

TINJAUAN HUKUM PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM *WORLD TRADE ORGANIZATION*

Oleh: Ganther Rizki Ariotejo<sup>1</sup> Veri Antoni<sup>2</sup>

## INTISARI

Penulisan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dikaitkan Dengan Prinsip National Treatment Dalam *World Trade Organization*” ditujukan untuk dapat memberikan buah pemikiran dan jawaban dalam perdebatan mengenai penggunaan kandungan lokal dalam industri minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia khususnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013 Tentang penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan normatif, yaitu dengan membandingkan antara masalah yang ada dengan peraturan yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui wawancara oleh responden, yang kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kandungan Lokal dalam Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi telah tidak konsisten dengan prinsip *National Treatment* yang ada dalam WTO, yakni yang telah diatur pada Article III.4 dan III.5 GATT juga Article 2.1 dan Paragraph 1(a) *Illustrative List* TRIMs, selain itu penggunaan Kandungan Lokal tersebut juga tidak dapat dijustifikasi dikarenakan tidak dapat memenuhi kriteria dalam pengecualian yang ada dalam GATT.

**Kata Kunci:** Kandungan Lokal, Prinsip *National Treatment*, WTO

---

<sup>1</sup> Mahasiswa S1 Fakultas Hukum UGM

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum UGM



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

TINJAUAN HUKUM PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DIKAITKAN

DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION

GANTHER RIZKI A, Veri Antoni, S.H., M.Hum

LEGAL REVIEW OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF REPUBLIC OF INDONESIA REGULATION NUMBER 15 OF 2013 CONCERNING THE USE OF DOMESTIC PRODUCTS IN UPSTREAM OIL AND NATURAL GAS BUSINESS ACTIVITIES IN RELATION TO NATIONAL TREATMENT PRINCIPLE ACCORDING TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION

By: Ganther Rizki Ariotejo<sup>3</sup> Veri Antoni<sup>4</sup>

## ABSTRACT

This undergraduate thesis that titled "Legal Review Of The Minister Of Energy And Mineral Resources Of Republic Of Indonesia Regulation Number 15 Of 2013 Concerning The Use Of Domestic Products In Upstream Oil And Natural Gas Business Activities In Relation To National Treatment Principle According To The World Trade Organization" is intended to provide insights and answers a long debate regarding the use of local content in the oil and gas industry in Indonesia which has been stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia Regulation Number 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Natural Gas Business Activities.

This thesis employs empirical and normative legal research method, which is done by comparing the existing problems with the current regulations. The research was conducted through interviews with relevant sources and afterwards, the data is analyzed qualitatively.

Based on the result of the research, it can be concluded that the use of Local Content in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 15 Year 2013 concerning the use of domestic products in upstream oil and natural gas business activities is not consistent with the National Treatment principle that is adopted by WTO through Article III.4 and III.5 of GATT, as well as Article 2.1 and Paragraph 1 (a) of an illustrative list of TRIMs, in addition to that, the use of the Local content also cannot be justified because it does not meet the criteria in the existing exceptions sets forth within GATT.

**Keywords:** Local Content, National Treatment Principle, WTO

---

<sup>3</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Lecturer of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada